

BAB IV

TERJADINYA KECENDERUNGAN OTORITARIANISME DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK TURKI DI ERA PRESIDEN ERDOGAN

BAB IV merupakan bab yang berisi pembahasan mengapa terjadinya kecenderungan otoritarianisme dalam politik dan pemerintahan Republik Turki di era Presiden Erdogan. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan ulasan tentang otoritarianisme sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan Erdogan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang otoritarianisme sebagai cara untuk menciptakan kondisi politik yang stabil dan sebagai kalkulasi para elit Turki. Setelah itu pembahasan akan menuju pada otoritarianisme sebagai langkah untuk menciptakan proses pengambilan keputusan politik yang efisien dalam pemerintahan Turki.

A. Otoritarianisme Sebagai Cara Untuk Mempertahankan Kekuasaan Erdogan

1. Peristiwa Kudeta Memperkuat Kekuasaan Erdogan

Semenjak Erdogan menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014, perubahan politik sudah mulai terasa. Erdogan seolah “mengikis” demokrasi yang telah ia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Erdogan menjadi sosok yang anti kritik bahkan siapapun yang mengkritik pemerintah, berhadapan dengan hukum. Erdogan mulai menjelma sebagai pemimpin yang cenderung otoriter hingga terjadi peristiwa kudeta militer yang gagal pada bulan Juli 2016, namun peristiwa kudeta militer yang gagal ini justru menjadi jalan yang mulus bagi Erdogan untuk bertindak semakin otoriter.

Peristiwa kudeta tersebut mengakibatkan pemerintah melakukan tindakan represif, dengan menetapkan status darurat (*state of emergency*) selama tiga bulan. Status darurat ini dimanfaatkan untuk “membersihkan” musuh politik Erdogan. Seperti yang disampaikan oleh Erdogan bahwa kebijakan ini diambil untuk 'membersihkan' semua pihak yang terlibat dalam kudeta militer, khususnya gerakan Fathullah Gulen yang menjadi pihak tertuduh. Dengan status darurat ini presiden dan kabinet dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen. Bak kecanduan, Erdogan memperpanjang masa darurat hingga satu tahun untuk “menghabisi” musuh politik yang dianggap sebagai ancaman.

Kurang dari satu tahun pasca peristiwa kudeta, tepatnya Minggu 16 April 2017, Erdogan berhasil memenangkan referendum yang digelar untuk mengubah sistem parlementer menjadi presidensial. Referendum ini dilakukan untuk menentukan apakah Turki akan melanjutkan sistem parlementer atau mengadopsi sistem presidensial dengan konstitusi yang baru. Setelah rangkaian proses yang panas, Presiden Erdogan mendeklarasikan kemenangan dengan menyatakan ada 25 juta orang mendukung amandemen konstitusi dimana kubu “Ya” dengan 51,5 persen pemilih, dengan selisih tipis dari kubu “Tidak.” Terdapat 160 ribu lebih tempat pemungutan suara di seantero Turki yang dipenuhi ribuan pemilih. Erdogan pun juga tidak ketinggalan untuk menjatuhkan suaranya bersama istri dan anak-anaknya di sebuah TPS di Ankara, ibu kota Turki.

Referendum ini tak bisa dipungkiri merupakan perkembangan politik paling penting di negeri itu sejak Republik Turki berdiri pada 1923. Amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan sangat besar bagi presiden atau eksekutif dan menafikkan peran parlemen dalam sistem presidensial yang baru. Sejak Republik Turki didirikan, Mustafa Kemal telah mengadopsi sistem parlementer yang memberikan kekuatan eksekutif dan legislatif kepada wakil-

wakil terpilih dari anggota parlemen. Pemerintahan diserahkan ke tangan legislator yang mewakili kedaulatan rakyat. Apa yang sudah dibangun oleh bapak bangsa Mustafa Kemal Attaturkn sejak tahun 1921 telah diruntuhkan dalam keputusan final referendum ini.

Referendum ini dilaksanakan masih dalam kondisi darurat yang diumumkan pemerintah sejak terjadinya kudeta militer yang gagal pada tahun 2016, maka kegagalan kudeta ini dimanfaatkan oleh Erdogan untuk menaikkan popularitasnya dan mendapat simpati dari masyarakat Turki hingga memenangkan referendum. Referendum kali ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari referendum tahun 2007 terkait jabatan presiden, yang mengurangi masa jabatan presiden dari tujuh tahun ke lima tahun. Pada referendum tahun 2007, presiden yang tadinya dipilih parlemen kemudian diubah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan Erdogan adalah presiden pertama yang dihasilkan oleh sistem baru tersebut.

Dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi presidensial berarti memberikan wewenang pemerintahan lebih besar untuk presiden dan jabatan perdana menteri akan dihapuskan. Semua urusan birokrasi berada dibawah kekuasaan presiden. Perubahan ini juga memungkinkan presiden untuk mengumumkan keadaan darurat, mengeluarkan dekrit di luar masa keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, serta membubarkan parlemen. Selain itu presiden juga boleh menjabat selama 2 periode, maka Erdogan diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dan 2024. Artinya ia bisa terus berkuasa hingga tahun 2029.¹

¹ <https://news.detik.com/internasional/d-3475894/erdogan-menangkan-referendum-turki-tinggalkan-sistem-parlementer> diakses pada 17 Maret 2018

Menurut kubu yang mendukung perubahan konstitusi, dukungan untuk mengubah sistem pemerintahan Turki ini dianggap mampu menciptakan pemerintahan yang efisien dan mampu menstabilkan jalannya pemerintahan yang digoyang oleh adanya tindakan terorisme, kudeta ,konflik Turki-suku Kurdi dan protes-protes besar sejak 2014. Sedangkan pihak oposisi mengkhawatirkan perubahan sistem pemerintahan akan menjadi ekspansi kekuasaan presiden dan sebagai jalan emas menuju otoritarianisme. Bahkan media –media Turki memberikan sebutan “Sultan Erdogan” baik dengan maksud positif atau negatif seperti oleh pihak yang khawatir akan kembalinya Ottoman baru di tangan Erdogan. Hal tersebut tidak berlebihan jika melihat saat ini Erdogan telah berhasil menguatkan perannya sebagai presiden yang paling berkuasa dan tidak bisa diganggu gugat serta semakin menguatkan cengkramannya di ranah politik Turki.

2. Motif Politik Erdogan

Sesuatu yang menjadi menarik dengan otoritarianisme erdogan adalah kekuasaan Erdogan yang menjadi sangat besar ini justru berada diatas legitimasi rakyat, artinya ia terpilih sebagai presiden atas pemilihan umum dan juga memenangkan referendum melalui dukungan rakyat lebih dari 50 persen suara. Namun kemenangan Erdogan dalam referendum ini memang tidak lepas dari kontroversi dan kecurigaan kecurangan dari hasil pemungutan suara. Apalagi referendum dilaksanakan saat masih dalam kondisi darurat dimana musuh politik Erdogan sudah “dihabisi”. Oposisi menganggap adanya kecurangan dari perhitungan suara. Erdogan telah berhasil semakin mencengkeram kekuasaannya di Turki. Karena dengan adanya amandemen konstitusi ini maka peran kepala negara tidak sekedar seremonial seperti sebelumnya, bahkan kekuasaan Presiden Erdogan dalam politik Turki menjadi semakin powerfull dan nyaris tanpa batas.

Sebagian masyarakat dan pakar Turki meyakini bahwa kudeta militer yang terjadi cenderung sebuah peristiwa terorganisir ketimbang gerakan spontan dari militer yang tidak puas. Menurut mereka kudeta ini merupakan skenario Erdogan dan timnya di militer. Karena kudeta yang gagal ini menjadi titik balik dan “pelicin” perubahan politik Turki dimana kekuasaan Erdogan mengarah ke otoritarian. Fetullah Gulen sebagai pihak tertuduh telah berkali-kali membantah tuduhan Erdogan. Ia juga justru menuding balik bahwa Erdogan telah merekayasa kudeta untuk menghabisi semua pengikut gerakan Hizmet.

Dalam memperkuat kekuasaannya, Erdogan memang membutuhkan suatu legitimasi hukum untuk mewujudkannya. Maka referendum dilakukan di waktu yang sangat tepat ditengah masa darurat Turki pasca kudeta dimana adanya simpati rakyat yang besar terhadap Erdogan dan melemahnya lawan-lawan politik Erdogan. Seorang ahli politik Timur Tengah dan Afrika dari lembaga *think tank* the Council on Foreign Relations, Steven A. Cook, mengatakan bahwa amandemen konstitusi memang akan memberikan Erdogan wewenang yang besar seperti “sultan”. Ia menyatakan "Erdogan butuh sampul hukum untuk mewujudkan agenda perubahan miliknya. Dan satu-satunya cara mewujudkannya adalah membuat dirinya seperti sultan," kata Cook dalam tulisannya di jurnal *Foreign Policy*.²

Jika melihat dari rentetan peristiwa –peristiwa yang terjadi, banyak pihak yang meyakini bahwa terjadinya kudeta militer sampai pada terjadinya referendum adalah sesuatu yang memang sudah di rencanakan dan di *design* oleh Erdogan sendiri, artinya ada motif politik Erdogan dibalik semua itu hingga saat ini ia telah terlegitimasi sebagai pemimpin yang otoriter. Hal ini masuk akal jika mengingat kekuasaan

²<https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2017-04-16/after-erdogans-referendum-victory> diakses pada 17 Maret 2018

Erdogan, secara konstitusi hanya bisa bertahan atau akan selesai di periode kedua presiden jika ia terpilih lagi pada tahun 2019, maka ia hanya bisa berkuasa sampai tahun 2024. Namun dengan amandemen konstitusi, penerapan pembatasan itu akan mulai pada tahun 2019. Dengan demikian Erdogan mulai tahun 2019, dapat memimpin dua periode sehingga masa jabatannya bisa berlangsung hingga tahun 2029 untuk dua periode lima tahunan. Erdogan penguasa Turki yang telah berkuasa belasan tahun sejak 2003 yang dimulai sebagai Perdana Menteri, tentu saja akan mengamankan *status quo* nya sebagai penguasa dengan mempertahankan kekuasaannya dengan waktu yang lebih lama.

B. Menciptakan Kondisi Politik Yang Stabil dan Kalkulasi Elit Turki

1. Keberhasilan dan Risiko Transisi Demokrasi

Keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Erdogan dan AKP berhasil merubah Turki dari keterpurukan selama ini dan menjunjung tinggi perdamaian, dengan pembangunan ekonomi dan penegakkan demokrasi. Erdogan mampu merubah Turki menjadi demokratis. Semenjak AKP berkuasa tahun 2002 dan berhasil memenangkan pemilu sebanyak 3 kali hingga Erdogan terpilih menjadi presiden Turki, Erdogan berhasil mewujudkan transisi menuju demokrasi yang mana merupakan ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini isu militer dan politik menjadi isu populer dalam konteks transisi politik dan hubungan sipil militer menjadi prasyarat penting karena demokrasi tidak dapat terkonsolidasi hingga militer secara pasti berada dibawah kendali sipil dan taat pada tatanan konstitusi yang demokratis.

Erdogan berhasil dalam membersihkan sisa rezim militer untuk kesetaraan hak militer dan sipil serta berhasil dalam

kontrol sipil terhadap militer. Salah satu referendum yang dilakukan pemerintahan AKP adalah tentang persidangan atau kedudukan militer di Turki. Kekuatan militer menjadi setara dengan kekuatan sipil. Pemerintah menetralkan posisi militer sehingga militer tidak bisa campur tangan dalam masalah pemerintah secara berlebihan. Militer pun mundur dari politik dan memerankan diri sebagai instrumen, sehingga kepemimpinan politik sipil yang dipegang oleh AKP dapat menentukan tujuan-tujuan politik dan membuat kebijakan – kebijakan negara Turki.

Selain itu juga adanya kebebasan pers hingga dibuat undang-undang kebebasan pers untuk memberikan informasi yang akurat untuk masyarakat. AKP mendukung bahwa demokrasi akan tercipta jika ada kebebasan informasi atau pers.³ Dengan adanya peran pers inilah pemerintah mampu mereduksi peran militer dalam pemerintahan dan juga kebebasan berekspresi masyarakat, sebagai wujud penegakan demokrasi. Saat militer sangat dominan dalam politik, pemerintah dan pers tidak bisa berdampingan dengan baik, bahkan media sangat kurang dalam pemberitaan pemerintah, namun dalam pemerintahan Erdogan, pemberitaan tentang pemerintah mulai bermunculan. Baik berita yang pro ataupun kontra dengan pemerintah.

Banyak pihak menilai Turki mampu menjadi inspirasi pembangunan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Turki dinilai berhasil dalam memadukan Islam dengan modernitas. Turki juga dinilai sebagai contoh nyata bagi dunia Arab dalam mewujudkan kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan

³ <http://www.akparti.org.tr/english/icraat/9174/freedom-of-press-expanded>

diakses pada 15 Maret 2018

kemajuan ekonomi.⁴Artinya Semangat demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Erdogan di Republik Turki, di satu sisi merupakan peluang bagi negara ini untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya di kawasan dan juga internasional.

Namun, keberhasilan Erdogan dalam membangun Turki yang lebih demokratis dan modern juga tidak lepas dari negative bagi kelangsungan nasional di internal negara Turki. keberhasilan ini juga memberikan dampak negatif .Pada faktanya transisi demokrasi yang dilakukan Erdogan juga memberikan resiko dan berkembang menjadi konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka jalan bagi rezim-rezim revolusioner yang ingin melakukan perubahan drastis seperti banyak pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Erdogan, khususnya kelompok sekuler dan oposisi yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Presiden Erdogan. Erdogan sebagai penguasa, sebagai elit politik yang menjadi aktor rasional tentu mempertimbangkan dan melakukan kalkulasi akan resiko dari demokrasi yang terus berjalan, apalagi dengan meluasnya pengaruh musuh-musuh politik Erdogan yang dinilai dapat menghambat atau mengancam kekuasaan dan kepentingan Erdogan, hingga terjadinya kudeta militer pada 15 Juli tahun 2016 untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

a. Ancaman Gerakan Gulen (Hizmet)

Fethullah Gülen adalah sosok ulama intelektual Turki.Gülen dan Erdogan dulunya adalah dua orang sahabat yang menjalin hubungan dengan baik.Erdogan pernah memiliki hubungan harmonis dengan Gülen.Gerakan Gülen juga merupakan pendukung kuat Erdogan bahkan ikut memperjuangkan kemenangan AKP pada pemilu 2002. Pada

⁴ S. Calleya, M. Wohlfeld (ed), 2012,*Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean*, Malta: University of Malta, hal. 370-371.

saat Erdogan masih menjabat perdana menteri, Gülen juga menjadi sekutu bagi Erdogan..Gülen dan Erdogan memiliki pandangan yang sama tentang demokrasi yang menjadi prioritas dan mengadopsi sekularisme secara pasif. Keduanya memiliki pandangan yang tidak bisa dipisahkan dari pandangan-pandangan yang Islamis.Gülen pernah dianggap sebagai guru sejati Erdogan dan guru spiritual AKP.Gülen memiliki peran yang krusial dalam kesuksesan karir politik Erdogan dan naiknya AKP ke puncak kekuasaan Republik Turki.Terdapat juga jaringan Gulen yang bekerja dalam lembaga kepolisian dan kehakiman yang bahkan mendukung upaya pemerintah untuk menyingkirkan musuh, khususnya anggota militer sebagai pengikut garis keras sekularisme dan penopang ideologi Kemalist yang selalu merancang upaya kudeta bagi partai-partai Islam.

Fethullah Gulen memulai gerakan gulenist, atau yang disebut *Hizmet* pada tahun 70-an dengan tujuan mencanangkan visi generasi emas .Gerakan ini dapat diibaratkan seperti Ormas Islam di Indonesia,namun tidak hanya bergerak dalam bidang sosial, mereka memiliki jaringan luas di berbagai sektor penting negara. Para pemuda didikan Gulen disebar ke seluruh lini negara seperti militer, kepolisian, kejaksasan dan birokrasi. Bahkan, jaringan mereka hingga ke luar negeri dengan kader-kader yang tunduk pada satu komando yakni Fethullah Gulen. Gulen memiliki cita-cita para pengikutnya menjadi para pemimpin masa depan melalui penetrasi kelembagaan negara dan birokrasi pemerintah.⁵Seiring perjalanan waktu, gerakan *Hizmet* menjadi gerakan besar tidak hanya di Turki, tetapi menyebar ke mancanegara melalui lembaga PASIAD .PASIAD menjadi suatu organisasi besar yang melahirkan sekolah-sekolah di berbagai negara dengan aset ribuan sekolah sekolah di Turki maupun di luar

⁵ S. Shroff, 2009, *Muslim Movements Nurturing A Cosmopolitan Muslim Identity: The Ismaili and Gülen Movement*, Georgetown University, Washington D.C., hal. 71

negeri seperti di Indonesia.⁶Gülen dan asosiasinya telah menjadi icon dari Turki yang Islami namun terbuka pada ilmu pengetahuan modern. Asosiasinya telah tersebar di berbagai negara dan tidak hanya menyebarkan ide Gülen saja namun juga memperkenalkan budaya Turki ke seluruh dunia. Jaringan internasional Gulen kini tercatat telah memiliki lebih dari 1.500 lembaga pendidikan dari semua tingkatan dan 15 perguruan tinggi yang tersebar di sekitar 140.

Keharmonisan antara Gulen dan Erdogan berakhir pada tahun 2010, dengan aksi Gulen mengkritik keras Erdogan yang mendukung pengiriman kapal Mavi Marmara untuk menembus blokade Jalur Gaza pada tahun 2010.⁷Sejak saat itu gerakan Gulenis tidak bisa bekerja sama dengan Erdogan sebagai pemegang kekuasaan negara Turki. Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat rahasia sehingga Erdogan sebagai pemegang tampuk kekuasaan di Turki sulit untuk menjalin kerjasama Terlebih gerakan Gulen juga menyebar dalam bidang media, Jaringan ini memiliki kantor berita Cihan, Samanyolu Media Group yang membawahi enam stasiun televisi dan tiga radio, serta koran harian Zaman dan Zaman Today versi bahasa Inggris, sebagai media terbesar di Turki.

Yang lebih menjadi ancaman bagi Erdogan yakni para pengikut Hizmet ini menempati posisi-posisi penting di Turki.Pengikut dan simpatisan Gulen telah menyebar dan mengontrol lembaga-lembaga penting negara, seperti militer, kepolisian, kehakiman, dan birokrasi.Jamaah Gulen secara resmi berorientasi pada sosial keagamaan, namun jaringan ini juga melakukan politik praktis.Jaringan Fethullah Gulen sering

⁶ Novian Uticha Sally, 2014, *PASIAAD sebagai Soft Power Turki di Indonesia*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, hal 25

⁷

<https://internasional.kompas.com/read/2016/07/19/12441961/puncak.perseteruan.erdogan-gulen> diakses pada 16 Maret 2018

kali mengkritik Erdogan melalui media dan birokrasi, dan bahkan menggerogoti pemerintah Erdogan dari dalam birokrasi negara. Jaringan Gulen juga menggunakan alat penyadap untuk merekam segala perilaku pemerintah Erdogan di semua jajaran birokrasi. Selain itu dengan luasnya jaringan Gulen di dunia, gerakan yang dipimpin Fethullah Gulen telah menjadi gerakan transnational yang berpengaruh di dalam dan luar Turki dinilai sebagai ancaman serius bagi kekuasaan Presiden Erdogan.

b. Ancaman Militer

Sejak Mustafa Kemal Atatürk Mendirikan republik Turki, Militer Turki menempatkan diri menjadi pengawal dan penopang ideologi Kemalisme atau kesekuleran Turki. Militer Turki menganggap dirinya penjaga Republik Turki dan yang dipercaya untuk menjaga enam prinsip Kemalisme. Cara penafsirannya yang khusus terhadap undang-undang menjadi sarana untuk melakukan segala penggulingan kekuasaan yang dilakukannya. Maka dengan itu militer dapat menumbangkan pemerintah-pemerintah sipil yang terpilih jika dinilai menyimpang dari jalan yang merusak prinsip-prinsip Republik Turki, terutama Sekularisme.⁸

Pada awalnya Mustafa Kemal Atatürk melarang tegas para anggota militer yang masih aktif berdinasi untuk menggeluti politik. Perintah itu dituangkan di dalam hukum militer nomor 1632 pada 22 Mei 1930. Kemudian Militer Turki masuk dalam urusan politik dimulai saat terjadinya kudeta pertama untuk menggulingkan Perdana Menteri Adnan Menderes pada 27 Mei 1960 dan berujung pada eksekusi mati terhadap Adnan Menderes.

⁸ Syarif Taghian, *Erdogan Muadzim Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*, PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2012, halaman 97

Setelah melakukan eksekusi kepada Menderes, militer mengembalikan pemerintahan kepada sipil namun tetap mendominasi politik Turki dengan kemunculan undang-undang tindakan internal bagi militer Turki yang diterbitkan komite persatuan nasional Turki. Undang-undang yang terbit pada 4 Januari 1961 ini memberi legitimasi bagi militer untuk melakukan intervensi politik jika dirasa perlu. Sejak terbitnya undang-undang ini terbit, kemudian terjadi kudeta berturut-turut pada tahun 1971, 1980, dan 1997. Kudeta ini hampir saja menjadi tradisi sepuluh tahunan militer Turki untuk menjaga kekuasaan dan kendali atas pemerintah sipil. Alasan formal dari kudeta-kudeta tersebut adalah menjaga ideologi kemalisme dari rongrongan kelompok reaksioner atau kelompok yang tidak sejalan dengan sekularisme seperti kelompok Islam, seperti kudeta militer tahun 1997 yang menggulingkan Perdana Menteri Erbakan, karena dituduh hendak menjadikan Turki negara Islam fundamentalis.

Di era kepemimpinan Erdogan, pemerintah Turki secara perlahan mencabut larangan-larangan yang diberlakukan pemerintah Turki sebelumnya yang sekuler. Banyak kebijakan Erdogan yang bertentangan dengan ideologi sekuler yang dibangun Mustafa Kemal Attaturk. Seperti salah satunya mencabut larangan mengenakan jilbab di ruang publik dan institusi pemerintahan, kecuali di institusi militer, kepolisian, dan hukum. Para lawan politiknya menganggap Erdogan tengah berupaya mengubah Republik Turki yang sekuler menjadi negeri dengan asas Islam. Begitu juga langkah Erdogan yang melarang minuman beralkohol hingga keputusan Erdogan untuk tetap memerangi etnis Kurdi yang melawan kelompok ISIS, dianggap sebagai pertanda bahwa Turki akan meninggalkan sekularisme.

Erdogan berulang kali selalu membantah tuduhan dari pihak-pihak yang menganggap bahwa Ia akan menggiring Turki untuk meninggalkan ideologi sekularisme yang telah diwariskan oleh Bapak Bangsa Turki yakni Mustafa Kemal Attaturk. Meski demikian, kekhawatiran tentang negara Turki

akan menjadi negara dengan asas Islam dan meninggalkan sekularisme tidak bisa dihilangkan, terutama dari benak para militer penjaga ideologi. Kekhawatiran inilah yang juga patut dicurigai sebagai kemungkinan sebagian anggota militer Turki melakukan aksi kudeta, sesuatu yang telah dilakukan oleh para senior mereka sebanyak empat kali di masa lalu ketika ideologi sekularisme dinilai terancam.

2. Menciptakan Stabilitas Politik

Kudeta terjadi hanya selang sembilan hari setelah Idul Fitri 1437 H yang jatuh pada tanggal 6 Juli 2016 lalu. Dalam huru-hara tersebut suasana sangat mencekam dan tak menentu. Peristiwa 15 Juli 2016 tersebut menyimpan cerita bersejarah bagi masyarakat Turki. Peristiwa tentang adanya guncangan oleh upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan pihak militer. Ibu kota negara yang berlokasi di Ankara dan kota bersejarah Istanbul adalah saksi nyata kegaduhan dan kerasnya suasana politik di tanah bekas kekuasaan Ottoman itu. Terjadi huru-hara di Turki, bom-bom pun berjatuh di Ankara, ibu kota Turki. Gedung parlemen tak luput dari bombardir senjata-senjata berat militer. Pesawat tempur militer yang mendukung pemerintah juga menembaki helikopter yang dipakai para pasukan yang melakukan kudeta. Selain itu insiden berdarah ini mengakibatkan banyaknya korban berjatuh. Sebanyak 249 orang tewas dan dua ribuan lainnya mengalami luka-luka. Dengan adanya upaya kudeta ini juga mengakibatkan terjadinya guncangan politik di dalam pemerintahan Turki baik eksekutif atau legislatif, karena banyak juga pejabat pemerintah yang ditangkap karena dianggap memiliki hubungan dengan Gülen. Peristiwa ini telah mengacaukan pemerintahan Turki dan menciptakan kondisi yang tidak stabil begitu juga kegaduhan sosial, dimana kendaraan dan pasukan militer menyerbu Ibu Kota Turki, Ankara dan Istanbul.

Atas terjadinya kegaduhan sosial dalam kudeta militer yang gagal ini Presiden Erdogan kemudian melakukan

tindakan yang represif. Pemerintah Turki menetapkan status darurat (*state of emergency*) selama tiga bulan. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan kebijakan ini diambil untuk 'membersihkan' semua pihak yang terlibat dalam kudeta militer. Menurut Erdogan, langkah ini sesuai dengan konstitusi Turki dan tidaklah bertentangan dengan aturan hukum dan kebebasan warga Turki. Dengan status darurat, presiden dan kabinet dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen.

Penerapan kondisi darurat dilakukan dengan tujuan membersihkan Turki dari semua individu dan kelompok yang terkait dengan gerakan Hizmet yang dipimpin Fethullah Gulen. Pemerintah melakukan operasi besar-besaran kepada pendukung Gulen dengan menangkap dan menahan warganya yang dituding sebagai kelompok Gulenis. Seperti dilaporkan AFP, Kamis 21 April 2016, "Kondisi darurat ini akan memudahkan kami membersihkan "teroris" yang terkait dengan ulama Turki berbasis di AS, Fethullah Gulen, yang memimpin percobaan kudeta dari istananya yang asri di Pennsylvania," ujar Erdogan. Yang lebih menghebohkannya lagi, Erdogan berencana memberlakukan hukuman mati kepada pelaku kudeta. Padahal, sejak 1984 Turki tidak pernah lagi menjalankan hukuman mati dan pada 2004 hukuman mati dilarang sebagai syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Selama masa darurat, pemerintah melakukan pembersihan di tubuh pemerintah dengan lebih dari 50.000 orang yang dicurigai ditangkap, dipecat, atau diberhentikan sementara. Pemerintah melalui pihak berwenang melarang semua akademisi untuk pergi ke luar negeri dalam rangka pembersihan pegawai negeri yang dicurigai terkait atas upaya kudeta tersebut. Terdapat sekitar 1.577 dekan, 21.000 guru, dan 15.000 pejabat Kementerian Pendidikan sudah diminta mengundurkan diri. Lebih dari 2.000 lembaga terkait Gülen di seluruh negeri ditutup. Sebanyak 35 lembaga kesehatan dan organisasi serta 1.043 lembaga pendidikan

swasta, organisasi, asrama, dan hostel ditutup karena memiliki hubungan dengan Gulen. Selain itu 1.229 yayasan dan asosiasi, 19 serikat, federasi dan konfederasi dan 15 sekolah dasar juga ditutup.

Pemerintah juga melakukan “pembersihan” dalam lembaga Militer dan kehakiman. Tercatat ada 6.000 tentara ditahan, 99 jenderal didakwa, 500 orang militer dan orang-orang yang terlibat kudeta kemudian ditahan karena terlibat dengan Fethullah Gülen beserta 9.000 orang petugas polisi, dan 2.700 hakim dan jaksa ditahan yang diduga terlibat dalam upaya kudeta. Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengatakan 113.600 orang telah ditangkap dan 47.155 dikembalikan ke penjara sehubungan dengan dugaan keterkaitan mereka dengan gerakan Gulen. Di antara orang yang dikembalikan ke penjara ada 10.732 perwira polisi, 7.643 tentara, 168 jenderal, 2.575 hakim dan pengacara, 26.177 warga sipil dan 208 administrator lokal, kata Soylu dalam satu wawancara dengan stasiun televisi setempat. Menurut Kementerian Dalam Negeri Turki sebanyak 23.861 tersangka perkara itu dibebaskan dan 863 lainnya masih buron.

Tindakan represif dan otoriter Erdogan dengan memberlakukan keadaan darurat selama tiga bulan memicu kekhawatiran pada dunia internasional. Kanselir Jerman Angela Merkel, melalui juru bicaranya mengatakan, penangkapan yang dilakukan pemerintah Turki setiap hari sejak kudeta yang gagal sangat bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku.⁹ Tindakan Erdogan yang represif sejak terjadinya kudeta gagal telah membuat banyak kalangan memprediksi Turki akan semakin sulit menjadi anggota Uni Eropa. Apalagi, Erdogan telah mengatakan akan kembali

⁹ <https://www.reuters.com/article/us-germany-turkey/top-merkel-aide-says-turkeys-conduct-unacceptable-idUSKBN1A80G6> diakses pada 16 Maret 2018

memberlakukan hukuman mati yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Uni Eropa.

Setelah hampir tiga bulan berlalu sejak diguncang kudeta, imbasnya masih belum berakhir sehingga membuat situasi politik di negara Turki tidak stabil. Perekonomian Turki juga terus melemah. Seperti Dilansir oleh Reuters, kesemrawutan dan kegaduhan politik dan ekonomi pasca kudeta yang belum juga berhasil dipulihkan mengakibatkan Presiden Erdogan secara mengejutkan memperpanjang masa darurat sampai satu tahun mendatang. Untuk tahap pertama, Erdogan akan memperpanjangnya selama tiga bulan, setelah itu dilanjutkan dengan tiga bulan lainnya sampai setahun. "Perpanjangan masa darurat ini akan menguntungkan Turki. Mereka bilang kalau langsung satu tahun, itu tak tepat buat Turki. Baiklah kalau begitu, kita tunggu dan lihat nanti, mungkin 12 bulan juga tak akan cukup," ujar Erdogan di hadapan sejumlah gubernur di Ankara.

Banyak anggota parlemen Turki dan politisi dari oposisi lainnya tak setuju dengan perpanjangan masa darurat tersebut. Seperti respon dari Partai Nasionalis oposisi CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Melalui Bülent Tezcan, CHP menyatakan bahwa pemerintah "kecanduan" untuk melakukan masa darurat dan mengibaratkannya sebagai *drug addiction*. Pemimpin partai oposisi Kemal Kilicdaroglu juga mengatakan, penetapan status darurat hanya boleh digunakan untuk membuat negara kembali normal, bukan untuk melakukan operasi dengan menangkap orang-orang yang tak bersalah. Erdogan mengabaikan protes dan kecaman dari para pengkritiknya itu. Dalam kasus ini banyak pihak yang mengkritik dan menyesali keputusan Presiden Erdogan. Namun jika dilihat dari situasi yang ada, tindakan represif dan otoriter yang dilakukan oleh Erdogan bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjaga pembangunan bidang sosial, ekonomi dan politik tetap berjalan dengan baik.

3. Otoritarianisme Sebagai Tindakan Rasional

Dengan adanya ancaman-ancaman dari pihak yang menjadi musuh politik Erdogan hingga terjadi kudeta, Pemerintahan Erdogan dalam hal ini melakukan suatu tindakan yang represif dan cenderung otoriter. Saat terjadinya kudeta oleh militer Erdogan menyatakan dengan tegas bahwa yang melakukan aksi kudeta adalah gerakan Gulenist. Namun pemimpin gerakan Gulenist, Fethullah Gulen yang berada di Amerika Serikat membantah terlibat dalam kudeta. Erdogan menetapkan bahwa Hizmet merupakan organisasi terlarang dan menggolongkan gerakan ini merupakan gerakan teroris, dimana tujuan dari gerakan ini adalah ingin menjatuhkan pemerintahan dan semua pengikutnya dianggap sebagai teroris.

Dari perspektif pemerintahan Turki kehadiran Gulen menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi eksistensi pemerintahan AKP dan kekuasaan Presiden. Erdogan meyakini bahwa adanya unsur politik yang dilakukan oleh pengkudeta, diantaranya adalah para pejabat tinggi di birokrasi sipil, kejaksaan dan aparat keamanan yang bekerja dalam jaringan rahasia Gulen. Para pengikut Gulen dalam lembaga-lembaga pemerintah justru lebih loyal kepada perintah Fethullah Gulen daripada institusi tempat mereka bekerja, dimana tujuan mereka adalah ingin disejajarkan dengan kedudukan Erdogan di bawah pimpinan Fethullah Gulen. Hadirnya personil-personil dalam lembaga –lembaga pemerintahan yang berafiliasi dengan Gulen adalah upaya untuk melakukan pengawasan dan delegitimasi terhadap pemerintah.

Erdogan tanpa ragu –ragu juga menuduh akan adanya gerakan negara tandingan (parallel state) berada di balik upaya percobaan kudeta yang gagal itu. Jika melihat kiprahnya yang cukup dominan dan berpenbaruh di dalam maupun di luar negeri, maka tidak heran jika Erdogan menyebut Gulen dan

para pengikutnya sebagai “negara dalam negara” atau musuh dalam selimut yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah dan menguasai Turki. Dengan kata lain, eksistensi *nation state* Turki terancam oleh gerakan *transnasional* Gulenis, dimana gerakan ini telah terlegitimasi secara internasional.

Meskipun kecurigaan Erdogan lebih tertuju kepada gerakan Gulen, namun insiden kudeta militer kali yang mengancam pemerintahan Erdogan ini juga patut diduga motif di belakangnya adalah keresahan dari pihak militer terkait haluan politik Erdogan yang diyakini banyak kalangan berusaha menghilangkan budaya dan nilai-nilai sekulerisme yang sudah dianut oleh Turki selama ini. Karena saat terjadinya kudeta, Reuters melaporkan ketika tentara Turki berada dalam gedung Stasiun Radio dan Televisi Turki (TRT) di Ankara dan menguasai gedung tersebut, militer membacakan pernyataan yang berbunyi "prinsip demokrasi dan sekulerisme di Turki telah terkikis oleh pemerintahan saat ini" dan Turki sekarang dipimpin oleh "Dewan Perdamaian" yang akan "menjamin keselamatan warga."¹⁰ Maka Erdogan juga melakukan pembersihan lembaga militer yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta.

Atas apa yang terjadi ini nampaknya menjadikan Erdogan banyak belajar dari pengalaman pahit yang terjadi di negara Mesir tentang adanya penggulingan Presiden Mursi. Sikap lemah terhadap lawan politik hanya akan berujung kejatuhan dari kepemimpinan dan terbunuhnya ribuan pendukungnya serta adanya “cap” sebagai organisasi teroris bagi partainya yang telah susah payah memenangkan pemilu secara demokratis, seperti yang disyaratkan oleh Barat jika ingin didukung.

¹⁰ <https://www.reuters.com/article/turkey-security-timeline/timeline-turkeys-attempted-coup-idUSL8N1A158X> diakses pada 17 Maret 2018

Dalam kasus yang terjadi di Turki ini tentu mengakibatkan elit politik Turki, khususnya Erdogan dan AKP sebagai pemegang tampuk kekuasaan Turki melakukan kalkulasi politik dimana tindakan yang represif dan otoriter kepada lawan-lawan politik nampaknya menjadi jalan terbaik guna menangkal ancaman-ancaman baru di kemudian hari. Selain itu Pemerintah sebagai aktor rasional tentu mempertimbangkan resiko jika tindakan yang demokratis dijalankan .Maka dengan cara yang bersifat otoriter, kekuasaan dan kepentingan-kepentingan Erdogan dan AKP tetap bisa berjalan dengan mulus.

C. Menciptakan Proses Pengambilan Keputusan Politik Yang Efisien Dalam Pemerintahan Turki

Salah satu cara Presiden Erdogan untuk memperkuat kekuasaannya adalah dengan memperkuat peran Presiden selaku kepala negara yang semenjak Republik Turki berdiri hanyalah sebagai jabatan seremonial. Sejak awal menjabat sebagai presiden , Erdogan sudah menegaskan keinginan untuk memperkuat kekuasaan presiden dengan merubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi sistem presidensial. Erdoga bahkan mengambil contoh Adolf Hitler yang pernah memimpin Jerman sebagai contoh keberhasilan sistem presidensial. Dalam konferensi pers, Jumat (1/1/2016), Saat itu wartawan bertanya kepada Erdogan apakah Turki akan mampu menjaga struktur kesatuan pemerintahan jika sistem presidensial dilaksanakan. "Sudah ada contoh di dunia. Anda bisa melihatnya ketika Anda melihat Hitler Jerman, "kata Erdogan dari sebuah rekaman yang disiarkan oleh kantor berita Dogan. "Ada contoh kemudian di berbagai negara lain."¹¹

¹¹<https://www.reuters.com/article/us-turkey-erdogan-hitler/turkish-presidency-says-erdogans-hitler-comments-misconstrued-idUSKBN0UF1T820160101> diakses pada 17 Maret 2018

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sebagai partai penguasa yang memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan umum, menganggap sudah saatnya Turki merubah sistem parlementer menjadi presidensial. Namun partai-partai oposisi mengutuk manuver politik tersebut dan menuduh upaya ini akan membuat Erdogan terlalu besar kekuasaannya dan membuat lebih mudah bagi Erdogan untuk membuat aturan oleh dirinya sendiri. Upaya AKP dan koalisi untuk meloloskan amandemen konstitusi baru ini mendapatkan pertentangan keras dari partai oposisi. Mereka khawatir aturan baru yang diamandemen akan merubah negara Turki menuju sistem otoritarian. Kekhawatiran itu bukan tanpa sebab, mengingat setelah upaya kudeta militer yang gagal pada Juli 2016, pemerintah bertindak secara represif dimana ratusan ribu warga Turki yang beraal dari pegawai negeri sipil, dosen, jurnalis, sampai mahasiswa ditangkap karena diduga terlibat dalam rencana menurunkan kekuasaan Erdogan.

Seperti yang dilaporkan AFP, Kepala Badan Pemilihan Umum Turki, Sadi Guven menegaskan bahwa hasil referendum tersebut sudah sah. Tetapi, pihak oposisi tetap meminta agar suara dihitung ulang. Namun Erdogan tidak merespon protes dari pihak oposisi. Adanya protes besar-besaran pun tidak terelakkan dan merebak di sebagian wilayah di kota-kota besar Turki seperti ibukota Ankara, Istanbul dan Izmir. Karena di ketiga kota ini lah justru suara yang 'tidak setuju' dengan perubahan konstitusi menang. Beberapa masyarakat dan pihak oposisi di Istanbul menunjukkan ketidakpuasannya dengan turun ke jalan dan melakukan aksi simbolis dengan memukul wajan dan panci, serta peralatan dapur lainnya sebagai cara perlawanan dan protes.¹²

12

internasional.kompas.com/read/2017/04/17/06174391/referendum.turki.dimenangkan.erdogan.oposisi.berniat.protes.diakses.pada.17.Maret.2018

Perubahan konstitusi baru yang dicanangkan Erdogan dan AKP beserta partai koalisi melalui referendum tersebut terdapat 18 paket. Dengan konstitusi baru ini nantinya akan memberikan kekuasaan nyaris absolut kepada presiden selaku kepala negara. Kekuasaan tersebut antara lain, menentukan kabinet, memilih atau memecat pejabat pemerintahan tanpa perlu persetujuan parlemen, hak menyusun anggaran negara, mengerahkan tentara, mengumumkan keadaan darurat, hingga mengeluarkan dekret presiden. Kekuasaan ini juga menghapus jabatan perdana menteri yang sudah ada dalam pemerintahan Turki sejak kudeta militer pada 1978. Amandemen baru setidaknya akan diimplementasikan pada 2019 dalam pemilihan presiden. Presiden terpilih nantinya akan dapat menunjuk wakil presiden dan kabinetnya. Dalam amandemen juga terdapat Presiden boleh menjabat 2 periode.

Sebenarnya sudah banyak politikus Turki yang menginginkan perubahan sistem politik dari parlementer ke presidensial. Erdogan adalah salah satunya. Erdogan menyatakan bahwa bukan hanya ia yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan ini, dua presiden sebelum Erdogan yakni Turgut Ozal dan Suleyman Demirel juga memiliki keinginan yang sama. Dalam sistem parlementer di Turki, posisi presiden diduduki oleh ketua partai politik terbesar pemenang pemilu, jika partai pemenang pemilu meraih mayoritas suara parlemen, maka pemerintahan non-koalisi dapat dibentuk. Namun jika ketua partai pemenang pemilu tidak bisa meraih suara mayoritas di parlemen, maka terpaksa harus membentuk pemerintahan koalisi.

Sebelum AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan berkuasa, terbilang hanya satu dari sedikit partai di Turki yang membentuk pemerintahan non-koalisi, maka Turki selalu dipimpin oleh pemerintahan koalisi. Banyak analis politik menilai ketidakstabilan pemerintahan-pemerintahan koalisi yang kemudian memberikan dampak pada politik yang tidak stabil adalah salah satu dari kelemahan dari parlementer. Selain

itu umur yang relatif pendek dari pemerintahan-pemerintahan koalisi di Turki juga mengancam negara itu terjebak dalam ketidakstabilan politik. Para politikus Turki selalu berusaha menemukan solusi untuk bisa keluar dari krisis tersebut, mengingat bahwa stabilitas politik dan ekonomi saling melengkapi satu sama lain. Turgut Ozal dan Suleyman Demirel, dua mantan perdana menteri Turki dan sejumlah mantan presiden adalah tokoh-tokoh politik negara yang menganggap dengan mengadopsi sistem presidensial adalah jalan keluar dari masalah pemerintahan .

Perubahan sistem politik Turki dari parlementer menjadi presidensial telah menjadikan kekuasaan Erdogan semakin luas, namun bagi Erdogan dan koalisi ini merupakan cara untuk menciptakan politik yang efisien. Hal ini dikatakan Erdogan dan mantan Perdana Menteri Turki dan juga ketua AKP Ahmet Davutoglu saat pertama kali merencanakan amandemen konstitusi ,mereka mengatakan sistem presidensial diperlukan agar struktur pemerintahan menjadi lebih ramping.¹³Perdana Menteri saat ini, Binali Yildirim mengatakan dengan keberhasilan referendum ini, Erdogan akan bisa meningkatkan perekonomian, mempercepat pembangunan dan melawan musuh asing serta domestik.¹⁴Walau disisi lain , kubu oposisi dan penentang Erdogan percaya, keinginan tokoh-tokoh politik AKP itu untuk mengubah sistem politik di negara Turki berbeda secara substansial,karena hanyalah cara menjadikan Erdogan semakin berkuasa dan otoriter.

¹³ <https://www.reuters.com/article/us-turkey-politics/turkey-shifts-to-presidential-system-even-without-constitutional-change-idUSKCN0YE1M3> diakses pada 17 Maret 2018

¹⁴ <http://www.hurriyetdailynews.com/yes-vote-will-win-in-referendum-finishing-off-pkk-and-isil-turkish-pm-yildirim-110466> diakses pada 17 Maret 2018

